

Manajemen Sarana Prasarana Bimbingan dan Konseling pada Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Tanah Laut

Noor Rahmah^{1*}, Husnul Madihah², Jarkawi³

¹⁻³Program Magister Administrasi Pendidikan, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, Indonesia

Corresponding Author's e-mail : rimbawansosial97@gmail.com

ARMADA
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981

ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada>

Vol. 04, No. 09 September, 2026

Page: 4674-4680

DOI:

<https://doi.org/10.55681/armada.v4i8.3319>

Article History:

Received: Juli 07, 2026

Revised: Agustus 21, 2026

Accepted: September 19, 2026

Abstract : *Guidance and counselling (GC) facilities and infrastructure are important factors in supporting the quality of GC services in schools; however, their provision at the junior secondary school level still faces various challenges. This study aims to describe the conditions of GC facilities and infrastructure, their management, the implementation of GC services amid limited facilities, and to formulate an alternative management model for GC facilities and infrastructure in junior secondary schools in Tanah Laut Regency. This research employed a qualitative approach using a case study design involving five junior secondary schools selected through purposive and snowball sampling. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation studies, then analysed descriptively and interpretively through source and method triangulation. The findings indicate that only one school has a dedicated GC room, while other schools still utilise multifunctional rooms, resulting in suboptimal service privacy. The provision of GC facilities has also not become a priority due to budget limitations. This study proposes a GC facilities management model based on school asset optimisation and school-community-corporate synergy as an alternative approach to supporting GC services in schools with limited facilities.*

Keywords : *Facilities Management; Guidance And Counselling; Junior Secondary School; Alternative Model; Tanah Laut*

Abstrak : Sarana dan prasarana bimbingan dan konseling (BK) merupakan faktor penting dalam mendukung kualitas layanan BK di sekolah, namun pemenuhannya pada jenjang SMP masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kondisi sarana prasarana BK, pengelolaannya, pelaksanaan layanan di tengah keterbatasan fasilitas, serta merumuskan model alternatif manajemen sarpras BK pada SMP di Kabupaten Tanah Laut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus pada lima SMP yang dipilih secara *purposive* dan *snowball sampling*. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-interpretatif melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya satu sekolah memiliki ruang khusus BK, sedangkan sekolah lainnya masih menggunakan ruang multifungsi sehingga privasi layanan belum optimal. Pengadaan sarpras BK juga belum menjadi prioritas akibat keterbatasan anggaran. Penelitian ini menghasilkan model manajemen sarpras BK berbasis optimalisasi aset sekolah dan sinergi

sekolah-masyarakat-korporasi sebagai alternatif pemenuhan layanan BK pada sekolah dengan keterbatasan fasilitas.

Kata Kunci: Manajemen Sarana Prasarana; Bimbingan Dan Konseling; Sekolah Menengah Pertama; Model Alternatif; Tanah Laut.

PENDAHULUAN

Bimbingan dan konseling (BK) memiliki peran strategis dalam memfasilitasi peserta didik agar dapat mengaktualisasikan potensi dirinya secara optimal, baik dalam aspek akademik, pribadi, sosial, maupun karier (Rahmawati, Fahmi, & Faizin, 2025). Namun demikian, sebagian sekolah masih memandang BK sekadar sebagai unit penanganan masalah insidental peserta didik, padahal keberhasilan layanan BK sangat bergantung pada dukungan sistemik, termasuk ketersediaan sarana prasarana yang memadai. Ketersediaan sarana prasarana BK yang layak akan mendorong minat peserta didik memanfaatkan layanan, sementara keterbatasannya justru menjadi salah satu faktor penghambat pencapaian tujuan layanan BK (Sugiarto, Neviyarni, & Firman, 2021).

Studi pendahuluan pada beberapa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Tanah Laut menunjukkan bahwa kondisi sarana prasarana BK masih sangat minim. Di sejumlah sekolah, ruang BK digabung dengan ruang usaha kesehatan sekolah (UKS) atau ruang lain, sehingga kerahasiaan dan kenyamanan konseli sulit terjaga. Kondisi ini sejalan dengan temuan Sari, Neviyarni, Ahmad, dan Syukur (2021) bahwa ketiadaan sarana prasarana menyulitkan personil BK berkolaborasi dalam pelaksanaan layanan, serta temuan Marimbun dan Pohan (2021) yang menggambarkan kesenjangan serupa pada berbagai SMP negeri di Indonesia. Munir, Podung, dan Mangantes (2024) turut menegaskan bahwa layanan BK yang memadai membantu peserta didik mencapai perkembangan optimal, namun pemenuhannya kerap terkendala oleh keterbatasan anggaran yang lebih diprioritaskan bagi kebutuhan akademik dan fisik bangunan lain.

Berbagai kajian terdahulu umumnya berhenti pada deskripsi kondisi sarana prasarana BK dan identifikasi kendala pengadaannya (Dalimunthe et al., 2022; Harahap et al., 2022; Bunda, Firman, & Neviyarni, 2025), tanpa menawarkan solusi struktural bagi sekolah yang secara faktual sulit merealisasikan pembangunan ruang khusus BK dalam waktu dekat. Padahal, ruang konseling merupakan salah satu prasarana minimum yang wajib dimiliki setiap satuan pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 dan diperkuat oleh Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan BK pada pendidikan dasar dan menengah. Kesenjangan inilah yang menjadi celah (gap) yang diisi oleh penelitian ini, yaitu dengan tidak hanya memotret kondisi riil di lapangan, tetapi juga merumuskan model manajemen alternatif yang kontekstual dengan karakteristik wilayah pedesaan Kabupaten Tanah Laut, khususnya pemanfaatan lahan sekolah yang relatif luas dan sinergi dengan masyarakat maupun korporasi pertambangan dan perkebunan di sekitarnya.

Secara teoretis, urgensi sarana prasarana BK tidak dapat dilepaskan dari hakikat layanan itu sendiri. Merujuk dasar filosofis teori terapi rasional emotif yang dikemukakan Masdudi (2015), manusia memiliki kecenderungan alami untuk memelihara diri, berbahagia, berpikir, mencintai, bergabung dengan orang lain, serta tumbuh dan mengaktualisasikan diri, namun sekaligus berpotensi ke arah pemikiran irasional yang destruktif. Kondisi inilah yang menuntut kehadiran layanan BK yang profesional, yang menurut Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 harus ditopang oleh kompetensi akademik dan profesional konselor secara utuh, mencakup pemahaman mendalam terhadap konseli, penguasaan kerangka teoretik BK, penyelenggaraan layanan yang memandirikan, serta pengembangan profesionalitas berkelanjutan. Betapapun mumpuninya kompetensi seorang guru BK, penyelenggaraan layanan yang efektif dan efisien tetap memerlukan dukungan sarana, prasarana, dan pembiayaan yang memadai sebagaimana diamanatkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014, sehingga sarana prasarana bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan prasyarat struktural bagi tercapainya tujuan pendidikan nasional melalui jalur non-akademik ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan bentuk sarana prasarana layanan BK pada SMP di Kabupaten Tanah Laut; (2) menggambarkan

pengelolaan pengadaan sarana prasarana BK di sekolah; (3) mendeskripsikan pelaksanaan layanan BK pada kondisi sarana prasarana yang terbatas; (4) mengidentifikasi upaya sekolah dalam pemenuhan sarana prasarana BK agar layanan dapat optimal; dan (5) merumuskan model manajemen sarana prasarana BK pada SMP di Kabupaten Tanah Laut dengan optimalisasi sarana prasarana yang terbatas. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan model manajemen yang kontekstual dengan karakteristik geografis dan sosial-ekonomi wilayah pedesaan, yang selama ini belum banyak disentuh oleh kajian-kajian sejenis di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, dengan pertimbangan bahwa fenomena manajemen sarana prasarana BK perlu dipahami secara mendalam dari perspektif emic informan, yakni bagaimana guru BK dan kepala sekolah memaknai dan menafsirkan kondisi sarana prasarana di lingkungannya masing-masing. Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri, dibantu pedoman wawancara sederhana yang dikembangkan seiring semakin jelasnya fokus penelitian. Lokus penelitian ditetapkan berdasarkan hasil survei pendahuluan terhadap data Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) BK tingkat SMP di Kabupaten Tanah Laut, sehingga diperoleh lima sekolah dengan karakteristik berbeda sebagai sampel, yaitu UPTD SMP Negeri 3 Pelaihari dan SMP-IT As-Salam Pelaihari (representasi penyelenggaraan BK relatif baik), SMP-IT Sirajul Huda Pelaihari dan SMP Tahfiz Bilingual Darul Qur'an Istiqomah Pelaihari (representasi sekolah berbasis pondok pesantren dengan keunikan penyelenggaraan BK), serta UPTD SMP Negeri 5 Takisung (representasi sekolah dengan sarana prasarana BK yang sangat terbatas). Pemilihan informan menggunakan kombinasi purposive sampling untuk informan kunci (lima guru BK) dan informan utama (lima kepala sekolah), serta snowball sampling apabila diperlukan informan tambahan untuk melengkapi dan memvalidasi data, hingga tidak ditemukan lagi variasi informasi baru (titik jenuh data).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu wawancara mendalam dengan informan kunci dan informan utama, observasi partisipatif (*participant observation*) di lokasi penelitian, serta studi dokumentasi terhadap arsip dan artefak terkait sarana prasarana BK. Sumber data dipilih dengan mengutamakan perspektif emic, yakni pandangan dan penafsiran informan sendiri terhadap kondisi di lapangan, sehingga penelitian ini lebih tunduk pada realitas empiris ketimbang asumsi subjektif peneliti sejak awal (perspektif etic). Proses pengumpulan data dihentikan setelah tidak lagi ditemukan variasi informasi baru dari informan, yang menandakan tercapainya titik jenuh (*replikasi*) data. Subjek penelitian terdiri atas lima informan kunci dari unsur guru BK dan lima informan utama dari unsur kepala sekolah pada kelima sekolah lokus penelitian. Guru BK dipilih sebagai informan kunci karena berperan langsung sebagai penanggung jawab teknis penyelenggaraan layanan BK, sedangkan kepala sekolah menjadi informan utama karena memiliki kewenangan pengambilan keputusan terkait pengadaan sarana prasarana sekolah, termasuk sarana prasarana BK. Apabila diperlukan, penambahan informan pendukung dilakukan melalui mekanisme snowball sampling untuk memperkuat validitas dan kelengkapan data yang diperoleh dari informan sebelumnya.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-interpretatif mengikuti tahapan: membaca transkrip wawancara secara berulang, menyusun data ke dalam tabel horisontalisasi (pernyataan penting, pemaknaan, dan makna terdalam), menyintesis makna tersebut ke dalam pola/tema, hingga menyusun kesimpulan. Proses analisis berlangsung sejak sebelum peneliti memasuki lapangan, selama pengumpulan data, hingga penyusunan laporan akhir, sehingga bersifat siklikal dan berkelanjutan, bukan tahapan linear yang terpisah-pisah. Keabsahan data diuji melalui tujuh upaya, yaitu perpanjangan keikutsertaan peneliti dalam pengumpulan data di lapangan, observasi yang dilakukan secara konsisten dan mendalam, triangulasi metode dan sumber data, diskusi dengan teman sejawat yang tidak terlibat penelitian (*peer debriefing*), analisis kasus negatif sebagai pembanding temuan, pelacakan kesesuaian dan kelengkapan hasil analisis, serta diskusi bersama seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengumpulan data. Ketujuh upaya ini ditempuh secara simultan agar simpulan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Sarana Prasarana Layanan Bimbingan dan Konseling

Secara umum, sarana pendukung layanan BK pada kelima sekolah lokus penelitian seperti alat pengumpul dan penyimpan data, komputer/laptop, hingga chromebook di SMP Tahfiz Bilingual Darul Qur'an Istiqomah telah tersedia dan hampir memenuhi kriteria minimum, kecuali jaringan internet khusus layanan BK yang hanya dimiliki UPTD SMP Negeri 3 Pelaihari. Kondisi ini berbanding terbalik dengan ketersediaan prasarana berupa ruang khusus BK. Dari lima sekolah, hanya UPTD SMP Negeri 3 Pelaihari yang memiliki ruang BK, itu pun berupa satu ruangan berisi tiga meja kerja dan sofa yang berdampingan dengan ruang kepala sekolah, sementara empat sekolah lainnya sama sekali tidak memiliki ruang khusus.

Temuan ini konsisten dengan pendapat Ananda dan Banurea (2021) bahwa ruang konseling merupakan bagian dari prasarana minimum yang wajib dimiliki setiap SMP, sejajar dengan ruang kelas, perpustakaan, laboratorium IPA, dan ruang guru. Ketentuan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 juga menegaskan bahwa ruang konseling harus menjamin kenyamanan dan privasi serta dilengkapi fasilitas pendukung seperti ruang tamu, ruang konsultasi, ruang bimbingan kelompok, dan ruang dokumentasi (Bunda *et al.*, 2025). Kesenjangan antara kondisi ideal dalam regulasi dan realitas di lapangan menegaskan bahwa penyediaan ruang BK belum menjadi prioritas kebijakan sekolah di Kabupaten Tanah Laut, sejalan dengan simpulan Marimbun dan Pohan (2021) pada SMP negeri lain di Indonesia.

Ditinjau dari jenis layanannya, eksistensi BK memiliki fungsi besar dalam pengembangan sumber daya manusia peserta didik, mengingat berbagai penyimpangan perilaku remaja yang muncul saat ini menjadi kekhawatiran tersendiri terhadap kualitas sosial dan karakter generasi bangsa (Rakhmawati, 2023). Layanan BK di sekolah umumnya meliputi layanan orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran, bimbingan belajar, konseling perorangan, serta konseling kelompok (Harahap *et al.*, 2022). Layanan orientasi dan informasi relatif tidak terlalu bergantung pada ruang khusus karena biasanya dilaksanakan secara klasikal pada masa awal peserta didik memasuki sekolah (Dalimunthe *et al.*, 2022). Sebaliknya, layanan penempatan dan penyaluran, bimbingan belajar, serta terutama konseling perorangan dan kelompok, sangat membutuhkan instrumen non-tes seperti wawancara, observasi, angket, sosiometri, catatan anekdot, dan skala penilaian, yang penggunaannya menuntut ruang yang tenang, privat, dan bebas dari gangguan agar validitas data psikologis yang digali dari konseli dapat terjaga. Dengan demikian, ketiadaan ruang khusus BK pada empat dari lima sekolah lokus penelitian berdampak paling nyata pada jenis layanan yang sifatnya personal dan mendalam ini.

Pengelolaan Pengadaan Sarana Prasarana Bimbingan dan Konseling

Mekanisme pengadaan sarpras BK bervariasi antarsekolah. Di UPTD SMP Negeri 5 Takisung, kepala sekolah telah mengidentifikasi kebutuhan dan mengajukan usulan pembangunan ruang BK, namun hingga penelitian ini dilakukan belum terealisasi. Di SMP Tahfiz Bilingual Darul Qur'an Istiqomah, usulan pengadaan berjenjang dari guru BK ke kepala sekolah lalu ke yayasan, tetapi hanya usulan yang dianggap mendesak yang direalisasikan, sedangkan ruang BK belum termasuk skala prioritas. SMP-IT As-Salam Pelaihari relatif lebih maju karena usulan ruang BK telah masuk dalam rencana jangka menengah lima tahunan sejak 2022, meskipun belum terealisasi. Adapun SMP-IT Sirajul Huda, karena menerapkan sistem pondok pesantren dengan sebagian penanganan masalah siswa dilakukan langsung oleh ustaz/ustazah, usulan sarpras BK secara formal belum pernah diajukan.

Pola ini menegaskan pendapat Sasoko (2022) bahwa keberhasilan sebuah perencanaan lebih ditentukan oleh keterlaksanaannya dalam praktik dibandingkan kesempurnaan teknis dokumen perencanaan itu sendiri. Prinsip perencanaan sarana prasarana BK idealnya memenuhi tiga syarat: didasarkan pada analisis kebutuhan riil, disusun secara realistis sesuai kapasitas anggaran, dan dirinci secara transparan dalam bentuk, jumlah, dan jenis (Minarti, dalam Ananda & Banurea, 2021). Namun dalam praktiknya, keterbatasan anggaran yang lebih banyak dialokasikan untuk kebutuhan akademik dan fisik bangunan lain menyebabkan usulan sarpras BK konsisten kalah bersaing, sebagaimana juga diungkap Nasiruddin, Fauzi, dan Hidayat (2024).

Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling dengan Sarana Prasarana Terbatas

Keterbatasan sarpras BK pada empat dari lima sekolah lokus penelitian berdampak pada rendahnya minat siswa memanfaatkan layanan, karena kerahasiaan dan kenyamanan konseling sulit dijamin ketika layanan dilakukan di ruang guru, ruang tamu, atau bahkan musala sekolah. Guru BK dituntut menyiasati keterbatasan ini agar layanan tetap berjalan, meskipun hasilnya belum optimal. Hanya UPTD SMP Negeri 3 Pelaihari yang pelaksanaan layanannya dinilai mendekati kondisi ideal. Sugiarto *et al.* (2021) mengingatkan bahwa ketersediaan sarpras yang maksimal tidak menjamin keberhasilan BK, tetapi ketiadaannya jelas menghambat pencapaian tujuan layanan sebuah paradoks yang tergambar jelas pada kelima sekolah lokus penelitian ini.

Upaya Sekolah dalam Pemenuhan Sarana Prasarana Bimbingan dan Konseling

Sekolah-sekolah lokus penelitian menunjukkan strategi adaptif yang berbeda-beda. SMP Tahfiz Bilingual Darul Qur'an Istiqomah dan SMP-IT As-Salam mengupayakan kenyamanan semaksimal mungkin dengan memanfaatkan ruang kepala sekolah, ruang tamu, atau ruang guru sembari terus mengusulkan pembangunan ruang khusus. UPTD SMP Negeri 5 Takisung, sebagai sekolah dengan sarpras BK paling minim, sejauh ini belum memiliki strategi substitusi selain memanfaatkan ruang seadanya. Adapun SMP-IT Sirajul Huda memanfaatkan gazebo yang tersebar di lingkungan pondok pesantren seluas sekitar 6,5 hektare untuk layanan konseling individual maupun kelompok sebuah praktik lokal yang secara tidak langsung menginspirasi rumusan model alternatif dalam penelitian ini.

Model Manajemen Sarana Prasarana Bimbingan dan Konseling Berbasis Optimalisasi Lahan Sekolah

Temuan bahwa sebagian besar SMP di Kabupaten Tanah Laut menghadapi masalah serupa berupa ketiadaan atau keterbatasan ruang BK, sementara pada saat yang sama berlokasi di kawasan perdesaan dengan lahan yang relatif luas sebagian di antaranya berada di lingkaran operasional korporasi pertambangan dan perkebunan kelapa sawit membuka peluang bagi solusi struktural yang berbeda dari sekadar menunggu realisasi pembangunan gedung baru. Penelitian ini merumuskan model manajemen sarana prasarana BK yang mengoptimalkan kelebihan lahan sekolah sebagai fungsi pengganti ruang BK, misalnya dalam bentuk gazebo atau ruang terbuka semi-tertutup yang tetap memperhatikan prinsip privasi dan kenyamanan konseli, sebagaimana dipraktikkan secara alami di SMP-IT Sirajul Huda.

Model ini dibangun di atas sinergi tiga pihak, yaitu sekolah, masyarakat sekitar, dan korporasi (perusahaan tambang/perkebunan) melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan, yang dijiwai semangat gotong royong sebagai nilai budaya luhur bangsa Indonesia. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip pengelolaan sarana prasarana pendidikan yang meliputi pencapaian tujuan, efisiensi, administratif, kejelasan tanggung jawab, dan kekohesifan (Jarkawi, 2024), sekaligus memperkuat fungsi pengawasan dan evaluasi sarana prasarana sebagaimana ditekankan oleh Oja dan Maisyaroh (2023). Dengan model ini, sekolah tidak perlu bergantung sepenuhnya pada realisasi anggaran pembangunan gedung yang sering tertunda, melainkan dapat segera menghadirkan ruang layanan BK yang lebih layak melalui pemanfaatan aset lahan yang sudah dimiliki serta dukungan kolaboratif pemangku kepentingan di sekitarnya.

Secara operasional, penerapan model ini dapat ditempuh melalui empat tahap. Pertama, tahap pemetaan aset, yaitu identifikasi bersama antara kepala sekolah dan guru BK terhadap luas dan lokasi lahan sekolah yang belum termanfaatkan secara optimal, termasuk area yang berpotensi dikembangkan menjadi gazebo atau ruang terbuka semi-tertutup. Kedua, tahap penggalangan sinergi, yaitu komunikasi formal sekolah dengan masyarakat sekitar dan korporasi setempat untuk membangun kesepakatan dukungan, baik dalam bentuk material, tenaga gotong royong, maupun dana tanggung jawab sosial perusahaan. Ketiga, tahap pembangunan dan penataan ruang, dengan tetap memperhatikan prinsip privasi, kenyamanan, ventilasi, pencahayaan, dan akustik yang layak sebagaimana disyaratkan standar ruang konseling, meskipun dalam bentuk fasilitas yang sederhana. Keempat, tahap pemeliharaan dan evaluasi berkelanjutan, yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar fungsi ruang tersebut tetap terjaga dan dapat dievaluasi secara berkala sesuai kebutuhan layanan BK yang terus berkembang.

Model ini tentu memiliki keterbatasan, antara lain kebergantungannya pada ketersediaan lahan yang relatif luas serta kesediaan korporasi maupun masyarakat sekitar untuk bersinergi,

sehingga tidak serta-merta dapat diterapkan secara seragam pada seluruh sekolah, khususnya di kawasan perkotaan yang padat dan minim lahan terbuka. Oleh karena itu, model ini lebih tepat diposisikan sebagai solusi transisional bagi sekolah pedesaan dengan karakteristik serupa dengan lokus penelitian ini, sembari sekolah tetap terus mengupayakan pembangunan ruang BK permanen sesuai standar yang berlaku secara bertahap.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sarana prasarana BK pada SMP di Kabupaten Tanah Laut secara umum belum menjadi prioritas program sekolah, tercermin dari hanya satu dari lima sekolah lokus penelitian yang memiliki ruang khusus BK, sementara sarana pendukung lain relatif sudah tersedia. Pengelolaan pengadaan sarpras BK diwarnai oleh proses perencanaan, pengadaan, penggunaan, inventarisasi, pemeliharaan, hingga pengawasan dan evaluasi yang belum berjalan optimal, terutama karena usulan ruang BK konsisten kalah prioritas dari kebutuhan akademik lain. Keterbatasan ini berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan layanan BK, meskipun sekolah telah berupaya menyiasatinya melalui pemanfaatan ruang yang ada. Kontribusi utama penelitian ini adalah model manajemen sarana prasarana BK berbasis optimalisasi lahan sekolah dan sinergi sekolah-masyarakat-korporasi, sebagai alternatif struktural bagi sekolah yang menghadapi keterbatasan gedung/ruangan layanan BK.

Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah pusat dan daerah memberikan perhatian lebih besar terhadap sarana prasarana BK melalui regulasi yang tegas disertai mekanisme insentif maupun sanksi, agar penyediaan ruang BK tidak lagi kalah prioritas dari kebutuhan akademik lain. Kepala sekolah, khususnya di wilayah dengan lahan yang relatif luas dan berdekatan dengan operasional korporasi besar, disarankan mempertimbangkan model optimalisasi lahan yang ditawarkan sebagai solusi jangka pendek-menengah. Penelitian lanjutan disarankan mengembangkan model ini secara lebih komprehensif, termasuk pengujian penerapannya pada konteks geografis dan sosial-ekonomi yang berbeda.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada kepala sekolah, guru bimbingan dan konseling, serta seluruh informan SMP di Kabupaten Tanah Laut yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses pengumpulan data penelitian. Apresiasi juga disampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan penelitian ini hingga terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, H. R., & Banurea, O. K. (2021). *Manajemen sarana dan prasarana pendidikan*. Widya Puspita.
- Anonimus. (2008). *Bimbingan dan konseling di sekolah*. Direktorat Tenaga Kependidikan, Ditjen PMPTK, Depdiknas RI.
- Bunda, I. P., Firman, & Neviyarni. (2025). Evaluasi sarana dan prasarana layanan bimbingan dan konseling di sekolah menengah atas berbasis IT. *Jurnal Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran*, 2(3), 775–780.
- Dalimunthe, D. E., Azzahra, D., Aulia, M., Berutu, S. A., Lubis, R. N., & Azhari, M. T. (2022). Pelayanan, sarana prasarana dan manajemen bimbingan konseling di MTsN 2 Deli Serdang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 13452–13459.
- Fawri, A., & Neviyarni. (2021). Konsep manajemen bimbingan dan konseling. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(1), 196–202.
- Harahap, A. F., Mayasari, A. D., Siregar, M., Wildani, T., Sitompul, Y. Y., & Azhari, M. T. (2022). Bentuk pelayanan BK, sarana prasarana, dan manajemen di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Abraar. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(4), 553–561.
- Jarkawi. (2024). *Manajemen program bimbingan dan konseling*. Sulur Pustaka.
- Marimbun, M., & Pohan, R. A. (2021). Gambaran sarana dan prasarana bimbingan dan konseling pada sekolah menengah negeri di Indonesia. *Enlighten: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 4(2), 76–87.
- Masdudi. (2015). *Bimbingan dan konseling perspektif sekolah*. Nurjati Press.

- Munir, S., Podung, B. J., & Mangantes, M. L. (2024). Konsep dasar sarana dan prasarana bimbingan konseling di sekolah SMA Negeri 26 Halmahera Selatan. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, 8(11), 430–432.
- Nasiruddin, Fauzi, A., & Hidayat, W. (2024). Manajemen sarana prasarana dalam meningkatkan kualitas lembaga pendidikan. *Journal on Education*, 6(3), 17404–17411.
- Oja, A. A. R., & Maisyaroh. (2023). Analisis pengawasan sarana prasarana di sekolah menengah pertama dalam kerangka kerja manajemen pendidikan. *Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Pembelajaran*, 3(2), 65–72.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang *Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA*.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang *Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang *Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor*.
- Rahmadani, S. K., Neviyarni, & Firman. (2024). Sarana dan prasarana bimbingan dan konseling serta solusinya terhadap permasalahan dalam pendidikan. *Jurnal Islamic Pedagogia*, 4(2), 150–157.
- Rahmawati, Fahmi, I., & Faizin, M. (2025). Pengaruh pengelolaan sarana prasarana bimbingan dan konseling terhadap layanan bimbingan karier peserta didik kelas XII di Madrasah Aliyah Negeri 2 Karawang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(2.D), 206–213.
- Rakhmawati, E. (2023). Bimbingan dan konseling dalam perspektif pendidikan: Aktualisasi peran bimbingan dan konseling dalam pendidikan Indonesia. *La-Tahzan: Jurnal Pendidikan Islam*, 15(2), 162–181.
- Sari, A. K., Neviyarni, Ahmad, R., & Syukur, Y. (2021). Pemanfaatan sarana prasarana dalam pelaksanaan bimbingan konseling di sekolah. *Jurnal Inovatif Ilmu Pendidikan*, 3(2), 126–140.
- Sasoko, D. M. (2022). Pentingnya perencanaan dalam upaya pencapaian tujuan yang efektif dan efisien. *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, 21(2), 83–89.
- Sugiarto, S., Neviyarni, & Firman. (2021). Peran penting sarana dan prasarana dalam pembelajaran bimbingan konseling di sekolah. *Jurnal Pendidikan Tematik*, 2(1).
- Suhertina. (2014). *Dasar-dasar bimbingan dan konseling*. CV. Mutiara Pesisir Sumatra.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.